

BAB II

DASAR TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1. Pemerintah Daerah

Di Indonesia urusan pemerintahan di daerah dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014, Pemerintahan Daerah adalah :

“Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”

Adapun tugas tugas pemerintah daerah yang diatur dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan bahwa penyelenggara pemerintah daerah adalah pemerintah daerah dan DPRD. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 juga menegaskan adanya delapan hak yang dimiliki daerah dalam menyelenggarakan otonomi yaitu:

1. Mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya.
2. Memilih pimpinan daerah.
3. Mengelola aparatur daerah.
4. Mengelola kekayaan daerah.
5. Memungut pajak daerah dan retribusi daerah.
6. Mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam dan sumber

daya lainnya yang berada di daerah.

7. Mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah.

8. Mendapatkan hak lainnya yang diatur dalam peraturan perundangundangan.

2.2 Budaya Organisasi

Budaya organisasi pada dasarnya dimiliki atau didapati dari sekelompok orang atau individu yang memiliki kebiasaan pada sesuatu hal. Budaya organisasi juga dapat dimiliki oleh pemerintah daerah. Budaya organisasi ini dapat memberikan peran yang penting dalam suatu kinerja. Dengan adanya budaya organisasi tersebut suatu organisasi dapat menjadi lebih terbiasa dalam bekerja karena adanya patokan atau dasar yang sebelumnya diajarkan pada setiap individu di organisasi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Budaya adalah sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan yang sudah sukar diubah. Budaya dapat dimiliki di setiap disetiap orang ataupun masyarakat. Budaya organisasi adalah kerangka kerja yang menjadi pedoman tingkah laku sehari-hari dan membuat keputusan untuk karyawan dan mengarahkan tindakan untuk mencapai tujuan organisasi (Rivai & Mulyadi, 2012).

Menurut Gibson (2001), budaya organisasi perusahaan mempunyai lima karakteristik, antara lain :

1. Mempelajari, yaitu kultur diperlukan dan diwujudkan dalam belajar, observasi dan pengalaman.
2. Saling berbagi, yaitu individu dalam kelompok, keluarga saling berbagi kultur dan pengalaman.

3. Transgenerasi, merupakan kumulatif dan melampaui satu generasi ke generasi berikutnya.
4. Persepsi pengaruh, yaitu membentuk 60 perilaku dan struktur bagaimana seseorang menilai dunia.
5. Adaptasi, yaitu kultur didasarkan pada kapasitas seseorang berubah atau beradaptasi

Menurut Siagian (2010) adanya fungsi Budaya organisasi didalamnya, antara lain :

1. Dapat dijadikan penentuan batasan di organisasi
2. Timbulnya rasa kepedulian dan memiliki pada antar individu
3. Adanya komitmen tinggi pada setiap individu demi tujuan organisasi.
4. Terciptanya kestabilan sosial di dalam organisasi
5. Menjadi alat patokan dalam mengendalikan perilaku di organisasi

2.3 Pusat Kendali

Pusat kendali atau yang biasa disebut *locus of control* biasanya merupakan bagian dari perusahaan atau suatu organisasi. Terdapat suatu pusat kendali, karena ada sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu baik organisasi maupun perorangan. Pusat kendali bisa dikatakan hal yang sangat penting. Menurut Sunyoto dan Burhanudin (2015) mengemukakan bahwa pusat kendali adalah :

“tingkat dimana individu percaya bahwa perilaku mempengaruhi apa yang

terjadi pada mereka.”

Pusat kendali juga dapat diartikan sebagai seseorang yang memiliki tanggung jawab pada sesuatu hal, orang tersebut memiliki kendali penuh untuk dapat melakukan atau memanfaatkan suatu hal. Adanya patokan agar dapat mengukur variabel *locus of control* yaitu : kegagalan yang dialami seseorang lantaran ketidaksesuaian, adanya perencanaan dalam pekerjaan yang sia-sia, sesuatu yang dialami dalam hidup dipengaruhi oleh orang yang berkuasa, kesuksesan individu karena faktor nasib, segala yang dicapai individu hasil dari usaha sendiri, menjadi pimpinan karena kemampuan sendiri, keberhasilan individu karena kerja keras, segala yang diperoleh individu bukan karena keberuntungan, kemampuan individu dalam memilih sesuatu dalam hidup, kehidupan individu dipengaruhi oleh tindakannya, kegagalan yang dialami individu dampak dari perbuatan sendiri. (Rotter, 1996).

Menurut (1984) Phares Adanya aspek pusat kendali yang terdiri dari 2, antara lain :

1. Aspek Internal

Adanya aspek yang ada pada faktor dalam diri seseorang terkait suatu peristiwa yang ada. Hal tersebut dapat terjadi karena adanya kemampuan seseorang, minat serta usaha yang ada pada diri seseorang tersebut.

2. Aspek Eksternal

Aspek tersebut dipengaruhi oleh adanya faktor yang ada pada luar diri seseorang atau diluar kendali. Seperti halnya kondisi sosial ekonomi, faktor keberuntungan, dan nasib.

2.4 Pengendalian Internal

Banyak faktor yang dapat menjadi pengaruh individu ataupun kelompok baik dari pengaruh dalam ataupun luar organisasi tersebut. Menurut Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 mengenai arti pengendalian yaitu proses secara integral terhadap tindakan dan aktivitas yang dilakukan secara berkelanjutan oleh pemimpin dan seluruh pegawai yang tujuannya memberikan keyakinan yang memadai terhadap tujuan organisasi yang telah dicapai melalui aktivitas yang efektif serta efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Jika dilihat dari pemaparan diatas pengendalian internal juga merupakan proses dari sebuah aktivitas yang ada di dalam kelompok agar sesuai dengan peraturan atau kebijakan yang sudah diatur dan tercapainya suatu tujuan organisasi. Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan pada Peraturan Pemerintah No 60. Tahun 2018 memaparkan bahwa terdapat pokok-pokok sistem pengendalian internal, antara lain:

1. Lingkungan Pengendalian (*Control environment*) Lingkungan pengendalian merupakan tempat atau suasana dalam suatu organisasi/perusahaan yang dapat memberikan pengaruh terhadap

kesadaran pengendalian dari individu yang ada pada organisasi tersebut. Lingkungan pengendalian ini merupakan unsur dasar pada pengendalian interna. Adanya kondisi antar individu yang menciptakan struktur dan kondisi yang optimal.

2. Penilaian Risiko (*Risk assessment*), adanya proses mencari informasi serta identifikasi risiko yang ada pada organisasi agar sesuai dengan visi dan misi yang sudah ada.
3. Kegiatan Pengendalian (*Control activities*) adanya upaya langsung berupaya arahan pemimpin instansi pemerintah tersebut sudah terlaksana dan adanya kepastian tujuan organisasi yang tercapai. Dalam hal ini pengendalian seperti pengembangan sumber daya manusia, tata kelola sistem informasi, serta pencatatan kegiatan yang jelas.
4. Informasi dan Komunikasi (*Information and communication*) Adanya perolehan informasi di setiap individu-individu dalam organisasi guna mendukung, mengelola kegiatan dalam operasional organisasi.
5. Pengawasan (*Monitoring*) pengendalian berupa Pengawasan merupakan proses penilaian keefektifan dan kualitas yang sudah dijadikan patokan, termasuk memodifikasi serta perbaikan jika diperlukan. Pengendalian internal tersebut mempunyai tujuan serta pencapaian dari kelima komponen pengendalian internal tersebut.

2.5 Penyalahgunaan Wewenang

Wewenang menurut KBBI merupakan suatu hak serta kekuasaan untuk melakukan tindakan atau kekuasaan untuk dapat mengambil keputusan serta memerintah. Wewenang dapat di ibaratkan sebagai seseorang mempunyai hak dalam tindakan untuk menyelesaikan tugas atau memiliki kuasa untuk memerintah individu lain untuk mencapai suatu tujuan. Penyalahgunaan wewenang pada dasarnya dapat dilakukan oleh siapa saja, baik itu karyawan biasa ataupun orang yang memiliki kekuasaan lebih dalam suatu hal. Menurut Indriyatno Seno Aji (2006) Penyalahgunaan wewenang diartikan pada 3 hal, antara lain :

1. Penyalahgunaan wewenang dapat melakukan tindakan yang bertentangan mengenai kepentingan umum atau untuk menguntungkan keinginan pribadi, ataupun organisasi.
2. Penyalahgunaan wewenang mengenai tindakan pejabat yang benar dimata masyarakat umum, tetapi menyimpang dari tujuan wewenang yang diberikan oleh undang-undang atau peraturan lainnya.
3. Penyalahgunaan wewenang yang menyalahgunakan ketentuan yang seharusnya digunakan untuk mencapai tujuan, tetapi adanya penggunaan prosedur lain agar terealisasi.

Penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pemerintah salah satunya adalah korupsi. Tindakan korupsi tersebut dilakukan oleh pejabat pemerintah yang menggunakan tanggung jawab atau wewenangnya untuk tujuan kepentingan pribadi. Penyalahgunaan wewenang tentu merupakan sebuah

tindakan kecurangan yang tidak sepatutnya dilakukan oleh aparat pemerintah. Menurut Seno Adji Indriyanto (2009) adanya parameter pada penyalahgunaan wewenang yaitu :

- a. Adanya unsur pada penyalahgunaan wewenang yang dinilai ada tidaknya pelanggaran pada suatu ketentuan atau peraturan dasar atau suatu kepatuhan pada masyarakat setrta negara.
- b. Adanya kepatuhan ketika dalam melaksanakan kebijakan apabila ada peraturan dasar itu direalisasikan pada situasi tertentu yang sifatnya mendesak.

Pada penyalahgunaan wewenang ini dimodifikasi, menyesuaikan agar variabel dapat dipakai pada penelitian ini.

2.6 Korupsi

Korupsi atau dalam Bahasa latin yaitu *corruption*, yaitu tindakan transaksi namun tidak dilakukan dengan sejujurnya sehingga menimbulkan suatu kerugian berupa materi uang, waktu ataupun tenaga pihak lain (Hussein, 1987). Korupsi dapat dilakukan oleh individu didalam organisasi, baik itu dilakukan karyawan tingkat rendah maupun pejabat dari organisasi tersebut. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) korupsi merupakan tindakan penyelewengan maupun penyalahgunaan materi uang milik negara ataupun perusahaan, yang diperuntukan pada kepentingan seseorang atau orang lain.

Korupsi menurut UU No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terdapat beberapa bentuk dari perbuatan korupsi, antara lain :

1. Menimbulkan Kerugian Negara
2. Penyuapan
3. Penggelapan dalam Jabatan
4. Pemasaran
5. Tindakan kecurangan
6. Ketimpangan kepentingan dalam pengadaan

2.7 Teori Agensi

Teori dasar yang berkaitan dengan pengaruh budaya organisasi, pusat kendali, dan pengendalian internal terhadap penyalahgunaan wewenang aparat pemerintah daerah Kabupaten Bogor dapat dijelaskan pada teori agensi. Menurut Anthony dan Govindarajan (2005), pengertian teori agensi adalah sebagai berikut:

“Teori agensi adalah hubungan atau kontrak antara principal dan agent. Hubungan agensi muncul ketika salah satu pihak (principal) menyewa pihak lain (agent) untuk melaksanakan suatu jasa, dimana principal mendelegasikan wewenang kepada agent untuk membuat keputusan.”

Salah satu contoh yang dapat diterapkan disini adalah Pemerintah Daerah (sebagai agent) sementara Pemerintah Pusat ataupun masyarakat (sebagai principal).

Pemerintah Pusat memberikan wewenang kepada Pemerintah Daerah untuk mengatur dan mengelola daerahnya sendiri, dengan kata lain Pemerintah Pusat memberikan otonomi daerah kepada Pemerintah Daerah. Berdasarkan UU No.23

Tahun 2014, pengertian Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemerintah daerah memiliki kewajiban dan wewenang dalam mengatur serta mengelola sumber daya yang ada didaerahnya secara optimal. Didalam kinerja pemerintah daerah tersebut merupakan indkiator yang dapat dinilai oleh masyarakat dan pemerintah pusat apakah adanya penyalahgunaan wewenang. Dalam hal ini penyalahgunaan wewenang tersebut juga mempunyai faktor yang mempengaruhinya. Pengaruhnya bisa saja dari Budaya Organisasi, Pusat Kendali, dan Pengendalian Internal.

Dalam melakukan tugas dan wewenangnya, pemerintah daerah diberikan kesempatan untuk mengambil bagian dalam melakukan pekerjaanya. Seperti kondisi atau budaya organisasi yang baik dan efektif dalam tugas aparat pemerintah daerah. Dengan adanya pusat kendali yang baik disetiap aparat juga akan mendukung pekerjaan pemerintah daerah. Memiliki pengendalian internal dalam organisasi pemerintah tersebut juga akan mendorong apakah pemerintah sudah semestinya berjalan dengan cukup baik dan sesuai ketetnuan yang berlaku terkait tugas kewenanganya.

2.8 Kerangka Konseptual

2.8.1 Budaya Organisasi terhadap Penyalahgunaan Wewenang Aparat Pemerintah Daerah

Budaya dapat dimiliki di setiap disetiap orang ataupun masyarakat. Budaya organisasi merupakan kerangka kerja yang menjadi pedoman tingkah laku sehari-hari dan membuat keputusan untuk karyawan dan mengarahkan tindakan untuk mencapai tujuan organisasi (Rivai & Mulyadi, 2012). Budaya organisasi bisa menjadi patokan sebagai pola pada setiap individu didalam organisasi tersebut, dan memiliki nilai-nilai yang sesuai dengan organisasi didalamnya. Disini dapat disimpulkan bahwa budaya organisasi selalu dimiliki oleh setiap kelompok yang akan memcapai tujuan, budaya organisasi tersebut berasal dari individu-individu didalamnya.

Budaya organisasi yang baik dalam organisasi menjadi penentu suatu kinerja organisasi tersebut. Jika aparat pemerintah menentukan budaya serta nilai yang sesuai dengan tujuan organisasi dan ketentuan yang ada, maka individu dan lingkungan tersebut akan menjadi bersistem sehingga tujuan organisasi dapat tercapai. Budaya organisasi ini mempunyai kompetensi dalam tugas dan wewenang aparat pemerintah daerah juga. Apabila budaya organisasi memiliki pondasi didalam organisasi tersebut sudah kuat dan memiliki nilai yang sesuai maka budaya organisasi juga berpengaruh dan mengurangi potensi pada penyalahgunaan wewenang.

2.8.2 Pusat Kendali terhadap Penyalahgunaan Wewenang Aparat Pemerintah Daerah

Menurut Sunyoto dan Burhanudin (2015) mengemukakan bahwa pusat kendali yaitu tingkat dimana individu percaya bahwa perilaku mempengaruhi apa yang terjadi pada mereka. Indikator untuk mengukur variabel *locus of control* adalah: kegagalan yang dialami individu karena ketidak mujuran, perencanaan jauh ke depan pekerjaan yang sia-sia, kejadian yang dialami dalam hidup ditentukan oleh orang yang berkuasa,

Hal ini berarti pusat kendali memiliki suatu pengaruh dimana akan saling mempengaruhi antara individu dengan individu lain yang saling memberikan arahan sesuai tujuan yang ingin dicapai. Suatu kinerja pemerintah daerah juga pasti memiliki pusat kendali untuk mengatur agar sesuai dengan tujuan dari daerah tersebut dengan baik. Apabila ada suatu individu memiliki kendali yang baik maka penyalahgunaan wewenang dapat dicegah dan adanya pengaruh negatif dari pusat kendali.

2.8.3 Pengendalian Internal terhadap Penyalahgunaan Wewenang Aparat Pemerintah Daerah

Pengendalian itu dilakukan dapat melalui proses perencanaan, pemrosesan, ataupun hingga pertanggung jawaban, agar terciptanya kondisi yang tertib dan terkendali secara penuh. Maka dari itu diperlukan pengendalian internal yang ada

pada lingkungan tersebut. Menurut PP No 60 tahun 2008 menyebutkan bahwa pengendalian internal merupakan :

“Proses yang terintegrasi pada perilaku dan kegiatan yang dilakukan secara berulang-ulang oleh pemimpin serta seluruh karyawan untuk menyatakan keyakinan atas pencapaian tujuan organisasi melalui praktek yang efisien dan efektif, pelaporan keuangan yang handal, keamanan asset negara serta taat pada ketentuan yang ada”

Pengendalian tersebut dapat ditetapkan bersama oleh masing-masing individu maupun kelompok agar dalam pekerjaannya dapat berjalan sesuai mestinya dan tujuan dapat tercapai. Dalam wewenangnya, agar terwujud pemerintah yang memiliki kendali yang baik dan terkendali, maka harus ada pengendalian pada kegiatan pada setiap pekerjaan pemerintah. Dengan pengawasan internal maka akan mengurangi penyalahgunaan wewenang aparat pemerintah.

2.9. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Nurfitri (2015) dengan judul Analisis Kriminologis Terhadap Penyalahgunaan Wewenang Dalam Jabatan Pemerintahan di Bandar Lampung dengan pendekatan normative dan Teknik pengumpulan data dengan wawancara narasumber. Hasil dari penelitian tersebut yaitu adanya pengaruh dari internal dan eksternal pada kepribadian pejabat pemerintah terhadap tindak korupsi penyalahgunaan wewenang jabatan.

Penelitian oleh Saputra (2017) dengan judul Peran Aparatur Pengawas Internal Pemerintah Sebagai Kendali Mutu dan Penjamin Kualitas Dalam Pencegahan Penyalahgunaan Wewenang Aparatur Sipil Negara. Dengan Pendekatan kasus dan metode pengumpulan data menggunakan data primer dan

sekunder, jenis penelitian ilmu normatif. Hasil penelitian tersebut yaitu Sistem Pengendalian Intern Pemerintah belum mewujudkan peningkatan efektivitas dan tindak lanjut pengawasan dalam penyalahgunaan wewenang.

Penelitian oleh Wahyuni (2016) dengan judul Pengaruh Budaya Organisasi, *Locus Of Control*, Stres Kerja Terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Daerah Dan Kepuasan Kerja Sebagai Variabel Intervening (Studi Empiris Pada Pemerintah Kabupaten Bengkalis). SKPD di Kabupaten Bengkalis sebagai objek penelitian. Adanyya uji validitas dan uji reliabilitas data pada Teknik Analisa data. Teknik pengumpulan data dengan pengumpulan pertanyaan / kuesioner. Hasil dari penelitian tersebut yaitu budaya organisasi berpengaruh positif terhadap kinerja aparat pemerintah daerah. Pusat kendali (*locus of control*) berpengaruh positif terhadap kinerja aparat Pemerintah Daerah. Stress kerja berpengaruh negative terhadap kinerja aparat Pemerintah Daerah.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Wuldandari (2013) dengan judul “Pengaruh Partisipasi Anggaran dan Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Daerah” menggunakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Padang sebagai objek penelitian. Teknik analisis yang digunakan yaitu uji validitas dengan menggunakan *Corrected Item-Total Correlation*. dan uji reliabilitas dengan *cronbach's alpha*. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah menggunakan kuesioner. Uji hipotesis menggunakan regresi linear sederhana dan koefisien determinasi. Hasil dari penelitian ini mengungkapkan bahwa Partisipasi Anggaran berpengaruh positif terhadap kinerja aparat Pemerintah

Daerah. Komiten organisasi berpengaruh positif terhadap kinerja aparat pemerintah daerah.

Tabel 2.1
Ringkasan Penelitian Terdahulu

No.	Nama	Variabel	Objek	Hasil
1.	Hariwibowo (2019)	<i>The Effect of Internet Slack on Learning Performance</i> Kehadiran sosial dan interaksi sosial sebagai variabel bebas dan prestasi belajar sebagai variabel terikat.	Mahasiswa Akuntansi	Penyalahgunaan Internet tidak berpengaruh terhadap kinerja pembelajaran
2.	Nurfitria (2015)	Analisis Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Wewenang Dalam Jabatan Pemerintah di Bandar Lampung Dependen : Penyalahgunaan Wewenang Jabatan Independen : Analisis Kriminologis	Aparat Pemerintah Bandar Lampung	Faktor eksternal dan internal pejabat berpengaruh positif terhadap penyalahgunaan wewenang
3.	Saputra (2017)	Peran Aparatur Pengawas Internal Pemerintah Sebagai Kendali Mutu dan Penjamin Kualitas	Data Sekunder Wawancara Inpektorat	Sistem Pengendalian Intern Pemerintah belum

		<p>Dalam Pencegahan Penyalahgunaan Wewenang Aparatur Sipil Negara</p> <p>Variabel Independen : Peran Aparatur Pengawas Internal Pemerintah</p> <p>Variabel Dependen : Pencegahan Penyalahgunaan Wewenang</p>	<p>Daerah Provinsi Sumatera Utara</p>	<p>mewujudkan peningkatan efektivitas dan tindak lanjut pengawasan dalam penyalahgunaan wewenang</p>
4.	Wahyuni (2016)	<p>Dependen : Kinerja Aparat Pemerintah Daerah</p> <p>Independen : Budaya Organisasi, Pusat Kendal</p> <p>Alat : Analisis regresi berganda</p>	<p>Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis</p>	<p>Variabel budaya organisasi berpengaruh positif, pusat kendali, komitmen organisasi terhadap kinerja aparat pemerintah daerah</p>
5.	Endrawati (2017)	<p>Analisis Terhadap Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Wewenang Dalam Jabatan Pemerintahan</p> <p>Independen : Tindak pidana korupsi penyalahgunaan wewenang Pendekatan Yuridis normatid dan pendekatan empiris.</p>	<p>Data primer dan sekunder</p> <p>Pemerintah Daerah Palangka Raya</p>	<p>Faktor eksternal dan internal berpengaruh terhadap tindakan korupsi penyalahgunaan wewenang</p>
6.	Purwoko (2012)	<p>Penyalahgunaan Wewenang Pejabat Dinas Pendidikan Terhadap Pemenuhan Hak Peserta Didik (Studi Kasus Dinas</p>	<p>Teknik sampling (wawancara)</p> <p>Dinas Pendidikan</p>	<p>Faktor kepentingan pribadi dan kurangnya transparansi berpengaruh positif terhadap</p>

		Pendidikan Kabupaten Sukoharjo) Independen : Penyalahgunaan wewenang Dependen : Pemenuhan Hak peserta didik Metode Deskriptif kualitatif	Kabupaten Sukoharjo	penyalahgunaan wewenang
--	--	--	---------------------	-------------------------

Sumber: Penelitian Terdahulu

2.10 Pengembangan Hipotesis

2.10.1 Pengaruh Budaya Organisasi terhadap Penyalahgunaan Wewenang Aparat Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor

Pada lingkungan yang ada pada pemerintah daerah tersebut terdapat kebiasaan atau pola yang dimiliki didalamnya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Budaya adalah sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan yang sudah sukar diubah. Budaya dapat dimiliki di setiap disetiap orang ataupun masyarakat. Budaya organisasi adalah kerangka kerja yang menjadi pedoman tingkah laku sehari-hari dan membuat keputusan untuk karyawan dan mengarahkan tindakan untuk mencapai tujuan organisasi (Rivai & Mulyadi, 2012).

Budaya organisasi pasti ada pada setiap kelompok, dengan perilaku untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Begitu pula aparat Pemerintah Daerah, jika budaya organisasi tersebut ada dan dijalankan dengan baik maka kinerja pada aparat Pemerintah juga akan baik dan optimal. Penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Wahyuni (2016) mengemukakan bahwa budaya organisasi

berpengaruh positif terhadap kinerja aparat Pemerintah Daerah. Sehingga budaya organisasi juga penting untuk menentukan kinerja aparat pemerintah daerah itu sendiri.

Dengan adanya budaya organisasi yang ada pada aparat pemerintah, dimana aparat pemerintah tersebut memiliki tanggung jawab serta wewenang, maka budaya organisasi memiliki pengaruh terhadap penyalahgunaan wewenang. Jika budaya organisasi diterapkan pada lingkungan kerja dan seluruh individu organisasi maka juga memiliki peran pada setiap tindakan dan kekuasaan setiap individu dalam menggunakan wewenangnya.

Berdasarkan Teori yang ada dan penjelasan pendukung, maka dapat disimpulkan hipotesis sebagai berikut:

HA1 : Budaya organisasi berpengaruh negatif terhadap Penyalahgunaan Wewenang aparat Pemerintah Daerah.

2.10.2 Pengaruh Pusat Kendalii terhadap Penyalahgunaan Wewenang Aparat Pemerntah Daerah Kabupaten Bogor

Agar suatu pekerjaan dan tujuan dapat berjalan baik dan optimal pasti terdapat arah serta kendali yang baik. Hal itu bisa didapatkan dari lingkungan aparat Pemerintah Daerah yang memiliki pusat kendali juga, Menurut Sunyoto dan Burhanudin (2015) mengemukakan bahwa pusat kendali yaitu tingkat dimana individu percaya bahwa perilaku mempengaruhi apa yang terjadi pada mereka. Indikator untuk mengukur variabel *locus of control* adalah: kegagalan yang dialami

individu karena ketidak mujuran, perencanaan jauh ke depan pekerjaan yang sia-sia, kejadian yang dialami dalam hidup ditentukan oleh orang yang berkuasa. Pusat kendali yang memiliki prinsip dan tujuan yang tepat akan menghasilkan hasil yang berkualitas juga. Pemerintah memiliki tanggung jawab dalam mengambil keputusan, adanya peran kepala atau pemimpin di organisasi pemerintahan yang memiliki kendali yang baik maka wewenang dan tanggung jawab pemerintah menjadi sesuai. Tentu dengan kendali yang tinggi dengan tujuan awal dan baik serta adanya ketetapan yang berlaku didalam pemerintah tersebut, penyalahgunaan wewenang dapat dihindari.

Berdasarkan teori yang ada dan penmaparan penjelasan pendukung maka dapat disimpulkan hipotesis sebagai berikut :

HA2 : Pusat kendali berpengaruh negatif terhadap Penyalahgunaan Wewenang aparat Pemerintah Daerah.

2.10.3 Pengaruh Pengendalian Internal terhadap Penyalahgunaan Wewenang Aparat Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor

Pada dasarnya pemerintah memiliki kendali dan pengaturan agar tujuan dari instansi pemerintah dapat tercapai. Agar semua perencanaan dan pelaksanaan dapat berjalan sesuai maka diperlukan pengendalian. Pengendalian tersebut ada pada lingkungan ataupun orang yang didalam instansi tersebut, maka diperlukan pengendalian internal yang mendukung itu semua. Setiap tindakan, keputusan dan wewenang yang diambil oleh aparat pemerintah memiliki faktor yang mendukung

hal tersebut. Dengan adanya pengendalian internal setiap tindakan atau aktivitas aparat pemerintah dapat dipantau dan meminimalisir kecurangan yang terjadi. Semakin tinggi pengendalian internal yang ada dan tingginya penerapannya maka penyalahgunaan wewenang dapat diminimalisir. Berdasarkan pengembangan dan penjelasan yang ada maka pengendalian internal dapat mengurangi penyalahgunaan wewenang aparat pemerintah Kabupaten Bogor.

HA3 : Pengendalian Internal berpengaruh Negatif terhadap Penyalahgunaan wewenang Pemerintah.

